BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan diskresi tindakan yang diambil oleh polisi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, serta dituntut untuk profesional dengan tetap menjaga nama baik instansi kepolisian dan dalam pelaksanaan diskresi tersebut terdapat beberapa batasan berdasarkan peraturan perundang-undangan : 1) Pembatasan diskresi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) Pembatasan Diskresi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. 3) Pembatasan Diskresi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4) Pembatasan diskresi Kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, yang terjadi di lapangan banyak aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini telah melampaui batasan sebagaimana disebut di atas. Tindakan diskresi hanya digunakan untuk keadaan darurat tanpa merugikan salah satu pihak.
2. Akibat hukum bagi aparat kepolisian yang melanggar kewenangan diskresi yang bertindak berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan hukum, maka dikenakan hukuman disiplin dan kode etik profesi kepolisian karena profesi

nya. Kendati demikian, pengenaan sanksi selain sebagai suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukannya, juga dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap aparat kepolisian yang telah melanggar.

B. Saran

1. Polri sebagai aparat penegak hukum yang di percaya dan dijadikan pedoman dalam berperilaku oleh masyarakat harus bertindak sesuai dengan aturan hukum. Polisi harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugasnya terutama terhadap pelaksanaan diskresi. Mengenai Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia yang berbunyi “. Dalam penjelasan Pasal diatas masih kurang lengkap dan tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan atas tindakan diskresi maka perlu adanya perubahan atas bunyi dari pasal tersebut, sehingga tidak memungkinkan terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dari pejabat kepolisian.
2. Akibat hukum terhadap kepolisian yang melanggar kewenangan diskresi harusnya di jelaskan agar konsisten dalam pelaksanaanya. Untuk itu perlu adanya transparansi dalam proses pemberian sanksi bagi polisi yang melanggar etik disaat pelaksanaan diskresi, yang menjadi parameter penentu sejauh mana penggunaan diskresi kepolisian tersebut itu diperbolehkan.